

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo - Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu – waktu dapat meletus. Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang sangat banyak dengan keberagaman suku, budaya, agama dan kondisi ekonomi dan politik menyebabkan Indonesia sangat kaya namun rentang terhadap konflik.

Bencana gerakan tanah atau sering disebut longsor tanah kerap terjadi di Indonesia dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ancaman Bencana longsor atau gerakan tanah yang terjadi di Indonesia menempati posisi ke-3 dengan jumlah frekuensi setiap tahunnya meningkat dengan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit. Setidaknya terjadi di Jember yang mengakibatkan 92 orang meninggal dunia, kemudian Trenggalek dengan korban jiwa 18 orang dan di Manado dengan korban jiwa 27 orang, begitupun di Sulawesi Selatan pada Juni 2006 terjadi banjir yang diikuti longsor yang mengakibatkan setidaknya 200 orang meninggal dan puluhan orang dinyatakan hilang.

Menurut Noor (2006, hlm 105) “Gerakan tanah adalah proses perpindahan satuan masa batuan/tanah akibat gaya gravitasi. Gerakan tanah seringkali disebut sebagai longsor dari masa tanah/batuan dan secara umum diartikan sebagai suatu gerakan tanah dan atau batuan dari tempat asalnya karena pengaruh gaya berat (gravitasi)”. Secara umum kejadian gerakan tanah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerakanya material tersebut.

Gerakan tanah adalah bencana geologi yang sering terjadi di Jawa Barat karena hampir setiap tahun terdapat gerakan tanah meski dalam rentang waktu yang relatif kecil namun gerakan tanah tersebut menimbulkan kerugian baik materi maupun korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2005 mencatat bahwa Jawa Barat menempati posisi pertama wilayah dengan lokasi rawan gerakan tanah, tercatat dari tahun 2003 sampai 2005 terjadi 77 kali bencana gerakan tanah yang mengakibatkan 166 jiwa meninggal dunia, 108 jiwa luka – luka, lebih dari 198 rumah hancur serta 1751 rumah rusak mulai dari rusak ringan sampai rusak parah, gerakan tanah itu juga mengakibatkan 140 ha lahan pertanian rusak yang mengakibatkan banyaknya petani yang kehilangan mata pencahariannya, dan 705 jalan terputus.

Gerakan tanah yang terjadi di Dusun Cigintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausama, Kabupaten Majalengka menyebabkan rusaknya bangunan, lahan pertanian dan sarana prasarana lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintahan Kecamatan Malausma gerakan tanah mengakibatkan amblesan tanah 3 sampai 5 meter hal tersebut memutuskan jalan sepanjang 50 meter, jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan Dusun Cigintung ke Kecamatan Malausma, gerakan tanah juga mengakibatkan bangunan – bangunan yang ada di Dusun Cigintung rusak parah sehingga tidak memungkinkan lagi untuk ditempati sehingga 610 kk atau sekitar 1.842 jiwa mengungsi, selain bangunan terdapat 8 hektar lahan pertanian diantaranya sawah yang siap panen ambles dan tertimbun sehingga ratusan kepala keluarga yang mayoritas petani kehilangan mata pencahariannya.

Rusaknya pemukiman masyarakat Dusun Cigintung akibat gerakan tanah yang terjadi tidak memungkinkan masyarakat untuk kembali menempati lahan pemukiman semula bukan hanya karena hancurnya bangunan – bangunan masyarakat namun kondisi tanah yang masih labil dan memungkinkan terjadi gerakan tanah susulan saat musim hujan menjadi faktor yang sangat diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Kabupaten Majalengka mencatat lebih dari

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

610 kk atau sekitar 1.842 jiwa Dusun Cigintung direlokasi ketempat yang lebih aman.

Pemukiman merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup seseorang disamping kebutuhan pokok yang lainnya, Prasarana lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pemasukan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Relokasi pemukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaen Majalengka dalam merelokasi masyarakat Dusun Cigintung bukanlah hal yang mudah dalam proses relokasi ini perlu diperhatikan tentang analisis keruangan, seperti yang dikemukakan oleh Bintarto (1979:14) *“dalam analisis keruangan yang harus diperhatikan adalah pertama, penggunaan penyebaran ruang yang telah ada dan kedua, penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangan”*. Dari pernyataan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merealisasikan relokasi diantaranya, kondisi lahan yang akan dijadikan tempat relokasi, serta bagaimana proses relokasinya. Lokasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Majalengka sebagai lokasi pemukiman baru masyarakat korban gerakan tanah terletak di Desa Jagamulya Kecamatan Malausma yang berjarak 9 Km dari lokasi bencana gerakan tanah.

Relokasi pemukiman masyarakat telah berlangsung sarana dan prasarana sudah mulai rampung bahkan sebagian masyarakat telah menempati tempat tinggal yang baru tercatat 450 kk sudah berpindah dan 160 kk lagi masih berada ditempat pengungsian dikarenakan bangunannya yang belum rampung. Namun dalam suatu proses pembangunan yang melibatkan sejumlah masyarakat tentunya harus memperhatikan tanggapan serta respon dari masyarakat itu sendiri. Respon merupakan balasan atau tanggapan seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena yang dilihat atau terjadi disekitarnya, dalam relokasi pemukiman yang telah berlangsung tersebut tentunya memperoleh respon dari masyarakat baik itu respon positif maupun respon negatif mengenai relokasi pemukiman.

Respon masyarakat merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintahan khususnya pemerintahan Kabupaten

Wiwini Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

Majalengka dalam membuat kebijakan serta dalam proses penanggulangan bencana yang terjadi. Keberlangsungan kehidupan masyarakat bukan hanya dalam bentuk tempat tinggal yang baru namun bagaimana masyarakat itu melanjutkan kehidupannya, proses relokasi yang telah berlangsung serta respon masyarakat terhadap lokasi pemukiman yang baru akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Kondisi Masyarakat Korban Bencana Gerakan Tanah Sebelum dan Setelah Relokasi Pemukiman di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi bahwa pemukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dimiliki masyarakat untuk menunjang kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat korban bencana gerakan tanah, hal tersebut diwujudkan dalam proses relokasi pemukiman masyarakat korban gerakan tanah. Masalah – masalah yang dapat diidentifikasikan dalam relokasi pemukiman yaitu :

1. Perubahan kondisi sosial masyarakat setelah terjadinya bencana gerakan tanah baik dalam segi mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.
2. Perubahan kehidupan masyarakat di lokasi relokasi pemukiman dalam segi fasilitas, aksesibilitas, ketersediaan air dan kenyamanan lokasi pemukiman.

C. Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul **“Kondisi Masyarakat Korban Bencana Gerakan Tanah Sebelum dan Setelah Relokasi Pemukiman di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka”** memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum terjadi bencana gerakan tanah di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana kondisi masyarakat setelah terjadi bencana gerakan tanah di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian “Respon Masyarakat Korban Gerakan Tanah Terhadap Relokasi Pemukiman di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka”. Sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi masyarakat sebelum terjadi bencana gerakan tanah di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
2. Mengidentifikasi kondisi masyarakat setelah terjadi bencana gerakan tanah di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya kondisi masyarakat korban bencana gerakan tanah sebelum terjadi bencana dan setelah relokasi pemukiman di Desa Jagamulya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
2. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintahan Kabupaten Majalengka dalam pembentukan kebijakan dan penanggulangan bencana gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Majalengka.

F. Definisi Operasional

1. Bencana Gerakan Tanah

Bencana Gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Menurut Noor (2006, hlm 105) “Gerakan tanah adalah proses perpindahan satuan masa batuan/tanah akibat gaya gravitasi. Gerakan tanah seringkali disebut sebagai longsorann dari masa tanah /batuan dan secara umum diartikan sebagai suatu gerakan tanah dan atau batuan dari tempat asalnya karena pengaruh gaya berat (*gravitasi*)”.

2. Relokasi Pemukiman

Relokasi pemukiman merupakan proses pemindahan lokasi pemukiman dari suatu tempat ketempat yang baru, hal tersebut dilaksanakan karena adanya beberapa faktor diantaranya status lahan yang ilegal serta pemukiman

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

tersebut berada di wilayah yang memiliki ancaman bencana yang tinggi. Relokasi pemukiman juga merupakan usaha nyata yang dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Majalengka untuk mensejahterkan masyarakat korban bencana gerakan tanah yang sebagian besar rumahnya rusak.

Lokasi merupakan penanda dari suatu tempat. Menurut Sumaatmadja (1988:118) “lokasi suatu benda atau suatu gejala dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi”. Lokasi disini merupakan tempat yang menjadi relokasi pemukiman masyarakat korban bencana gerakan tanah. Dalam hal ini relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pemindahan tempat dari tempa asal ke tujuan (Anonim, KBBI, 2002), relokasi disini merupakan relokasi pemukiman masyarakat korban bencana gerakan tanah.

G. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi disusun dari lima bab dengan masing – masing bab memiliki isi yang berbeda yang didudun secara sistematis dan terpadu. Tetapi secara garis besar konten dari lima bab tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab 2 menguraikan tentang teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini mengenai konsep dasar geografi yang mengkaji tentang pariwisata, potensi pariwisata, kemenarikan pariwisata dan karakteristik wisatawan.

3. BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan mengenai tahapan yang harus dilakukan dalam proses penelitian seperti lokasi penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, variabel penelitian, populasi sampel penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan instrumen penelitian.

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 membahas mengenai rumusan masalah yang telah disusun pada bab 1 dengan landasan teori pada bab 2 dan teknik analisis dan pengumpulan data pada bab 3, sehingga pada bab ini akan menjawab pertanyaan yang ada pada penelitian ini yaitu mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Musi Banyuwasin Sumatera Selatan.

5. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 berupa penyajian dan pemaknaan peneliti terhadap hasil dari analisis penelitian dan pemberian saran dari hasil penelitian dan untuk penelitian selanjutnya.

H. Reverensi Terdahulu

Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metodelogi penelitian	Hasil penelitian
1	Aty Widhyastuty (2011)	<i>Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Gerakan Tanah Di Kecamatan Majalengka</i>	1) Bagaimana tingkat kerusakan barang kepemilikan korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka 2) Bagaimana tingkat kerugian yang dialami korban bencana gerakan tanah di Kecamatan Majalengka 3) Bagaimana sikap masyarakat korban bencana gerakan tanah terhadap rencana relokasi pemukiman dilihat dari tingkat kerugian, tingkat kerusakan, studi kepemilikan rumah, pengetahuan luas lahan ganti rugi, pengetahuan jumlah uang ganti rugi, dan pengetahuan mekanisme	Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif	1) Tingkat kerusakan rumah korban bencana gerakan tanah 38,6% rusak ringan, 28,4% rusak sedang dan 33% rusak parah. 2) Tingkat kerugian yang dialami masyarakat mulai dari <RP.1.000.000,- sampai >RP.2.000.000. tidak ada korban jiwa hanya 6,8% masyarakat luka – luka. 3) Sikap masyarakat dilihat dari tingkat kerusakan, kepemilikan tanah, pengetahuan proses relokasi keseluruhan bersedia untuk dilaksanakannya relokasi ke tempat

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

			ganti rugi.		yang baru. Namun dalam segi penggantian ganti rugi uang banyak masyarakat yang kurang setuju.
2	Nunung Nuraeni (2011)	<i>Persepsi Masyarakat Korban Banjir Terhadap Rencana Relokasi Pemukiman Pada Daerah Banjir di Kecamatan Baleendah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana persepsi masyarakat korban banjir terhadap potensi banjir di Kecamatan Baleendah 2) Bagaimana mekanisme relokasi pemukiman yang terkena banjir di Kecamatan Baleendah 3) Bagaimana persepsi masyarakat korban banjir terhadap rencana relokasi pemukiman pada daerah banjir di Kecamatan Baleendah 	Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hampir semua Masyarakat sadar akan tingginya potensi banjir yang ada di Baleendah dilihat dari jawaban masyarakat yang signifikan, namun masyarakat seolah tidak peduli dengan resiko tersebut. 2) Mekanisme relokasi oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat korban banjir dengan status kepemilikan lahan milik masyarakat, serta jalan dan tempat ibadah akan disediakan oleh pemerintah. 3) Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang setuju untuk direlokasi hal ini terbukti dari

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

					13% masyarakat setuju untuk direlokasi sedangkan 87% masyarakat tidak setuju untuk direlokasi.
3	Dessy Caesarani N (2014)	<i>Respon Masyarakat Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Kawasan Alun – Alun Kota Bandung Menuju Tempat Penampungan Pedagang Sementara Gedebage</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana kebijakan pemerintah kota bandung merelokasi PKL dari kawasan Alun – alun kota bandung menuju TPS Gedebage. 2) Bagaimana respon para PKL yg direlokasi terhadap pelaksanaan relokasi PKL. 3) Bagaimana respon masyarakat terhadap bebasnya Alun – alun Kota Bandung dari keberadaan PKL 	Metode yang digunakan adalah metode Survey Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan relokasi PKL dilatar belakangi oleh adanya perda Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 pasal 20 yang menjelaskan bahwa PKL dilarang berjualan di Zona Merah dan Alun – Alun Kota Bandung merupakan salah satu dari zona merah. 2) Masyarakat sangat mendukung dengan adanya relokasi PKL karena jalanan lebih bersih dan tertib. 3) Dari 878 PKL hanya 406 yang dengan setuju untuk direlokasi ke TPS Gedebage, selebihnya PKL

Wiwin Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

					kurang setuju karena TPS Gedebage sangat jauh sehingga menambah biaya transfor, dan dekat dengan pasar induk.
--	--	--	--	--	---

Wiwini Widiawati, 2015

KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Wiwin Widiawati, 2015

**KONDISI MASYARAKAT KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH RELOKASI
PEMUKIMAN DI KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu